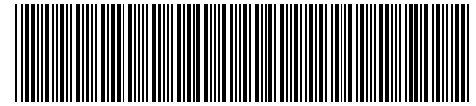




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.693021/2025**



DS:2445-0466-5588-9079

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 4. Kode/Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
- Sebesar : Rp. 1.835.625.000 (SATU MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.835.625.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.835.625.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.835.625.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 1.835.625.000

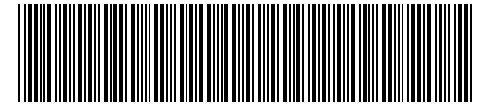
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2445-0466-5588-9079

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.835.625.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			1.835.625.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	850,00	Orang	1.573.825.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	600.00	Orang	643.255.000
		02	BDC.002 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	100.00	Orang	880.070.000
		03	BDC.003 Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	150.00	Orang	50.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk	3,00	Produk, Layanan	261.800.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	3.00	Layanan	261.800.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

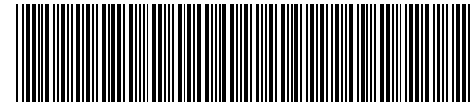
ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2025

I B. SUMBER DANA



DS:2445-0466-5588-9079

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Provinsi : (33) PAPUA BARAT
 Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.835.625.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	1.835.625.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2445-0466-5588-9079

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693021	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT	-	1.835.625	-	-	-	1.835.625		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.835.625	-	-	-	1.835.625		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	1.835.625	-	-	-	1.835.625		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	1.573.825	-	-	-	1.573.825	33 . 51	
04	PNBP	-	1.573.825	-	-	-	1.573.825	065@	
7121.BKB	Pemantauan produk (33.51 PAPUA BARAT / KOTA SORONG LAMA)	-	261.800	-	-	-	261.800	33 . 51	
04	PNBP	-	261.800	-	-	-	261.800	065@	
JUMLAH		-	1.835.625	-	-	-	1.835.625		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2445-0466-5588-9079

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (693021) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

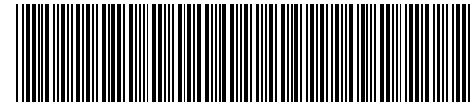
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693021	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	43.725	42.875	143.600	85.395	215.990	225.000	101.625	287.200	260.325	149.495	177.595	102.800	1.835.625
		BELANJA BARANG	43.725	42.875	143.600	85.395	215.990	225.000	101.625	287.200	260.325	149.495	177.595	102.800	1.835.625
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	43.725	42.875	143.600	85.395	215.990	225.000	101.625	287.200	260.325	149.495	177.595	102.800	1.835.625
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	43.725	42.875	143.600	85.395	215.990	225.000	101.625	287.200	260.325	149.495	177.595	102.800	1.835.625

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2445-0466-5588-9079

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693021] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693021	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 695.430		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 695.430		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.300
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 439.900		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.630		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.450		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.750		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
7121.BKB	Pemantauan produk		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 74.000		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.693021/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:2445-0466-5588-9079

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [693021] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002